

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan Belanda memiliki keterkaitan erat dengan kontribusi besar yang diberikan oleh pesantren. Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tertua telah menjadi pusat pembentukan karakter, pemikiran, dan mobilisasi masyarakat.¹ Meskipun pada awalnya, pesantren tidak direncanakan sebagai lembaga pendidikan permanen yang hadir di tengah masyarakat. Namun, saat era kolonialisme menguasai beberapa wilayah di Indonesia, pesantren memainkan perannya sebagai basis perlawanan terhadap kekuasaan kolonial.² Sehingga para ulama di pesantren menjadi pendorong utama perjuangan kemerdekaan, bekerja sama dengan rakyat dalam perlawanan aktif melawan Belanda dan sekutunya.

Selama periode kolonial, ulama-santri secara konsisten menunjukkan sikap anti-kolonial dengan menjaga tradisi perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Perlawanan ini tidak semata-mata didorong oleh pembelaan terhadap pihak tertentu, tetapi lebih karena tindakan penindasan dan gangguan terhadap

¹Riskal Fitri dan Syarifuddin Ondeng, Pesantren di Indonesia: Lembaga Pembentukan Karakter. *Al-Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, Vol. 2 No. 1, 2022, hlm. 44

² Achmad Kurniawan, "Sejarah Perkembangan Pondok Pesantren Daarul Rahman Tahun 1990-2015" (Skripsi: Jakarta, Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017) hlm. 5

agama Islam oleh penjajah.³ Banyak ulama-santri yang terus-menerus berjuang melawan kolonial, salah satunya dengan meletusnya Perang Jawa Diponegoro yang berlangsung antara tahun 1825 hingga tahun 1830 dibawah kepemimpinan Pangeran Diponegoro. Perang ini juga melibatkan sejumlah besar ulama dan santri dari berbagai wilayah di Pulau Jawa, yang bersatu untuk mempertahankan tanah air dan nilai-nilai agama dari pengaruh kolonial.⁴

Perjuangan para santri tidak berhenti sampai Indonesia meraih kemerdekaan. Pada masa revolusi, pesantren tetap menunjukkan peran pentingnya melalui keterlibatan laskar-laskar dalam melawan penjajahan Belanda. Pada saat itu hampir semua pondok pesantren bergabung menjadi anggota Hizbullah dan Sabilillah. Sehingga kegiatan pondok pesantren pun lebih berfokus pada pelatihan militer dan olah fisik. Para kyai, haji, dan guru ngaji sering kali menjadi pelopor dalam perlawanan sosial politik terhadap penguasa kolonial.⁵ Beberapa pesantren yang turut berperan dalam perjuangan tersebut antara lain Pesantren Tebuireng di Jombang, Pesantren Tambakberas di Jombang, Pesantren Sidogiri di Pasuruan, Pesantren Lirboyo di Kediri, Pesantren Talangsari di Jember, Pesantren Misbahul Wathan di

³ Abdur Rozzaq & Muhammad Isa Anshori. Peran Pesantren Dalam Perjuangan Melawan Penjajah Barat di Indonesia, *Tsaqofah: Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, Vol. 4 No. 2, 2024, hlm. 1241

⁴ Ibid, hlm. 1240

⁵ Ahmad Royani, Pesantren dalam Bingkai Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. *Jurnal Islam Nusantara*, Vol.02 No. 01, 2018, hlm. 125.

Malang, Pesantren Sukorejo di Situbondo, serta sejumlah pesantren lainnya.

Salah satu pesantren yang juga terlibat dalam perjuangan melawan penjajah adalah Pondok Pesantren Al-Hamidiyah yang didirikan oleh kyai Abdul Hamid pada tahun 1931 dengan nama Pesantren Cicau, selain sebagai sarana untuk menyebarkan ajaran Islam di wilayah Pangkalan dan Kecamatan Langkaplancar. Kyai Abdul Hamid lahir pada tahun 1908 di Dusun Cimanjeti, Desa Jayasari, Kabupaten Pangandaran. Sebagai anak pertama dari pasangan KH Abdul Ghani, yang merupakan Kepala Desa Pangkalan, dan Ibu Iti, yang berasal dari keturunan Pamijahan Sukapura, ia tumbuh dalam keluarga besar yang terdiri dari 15 saudara.

Pendidikan Kyai Abdul Hamid dimulai pada usia 8 tahun di Sekolah Rakyat (SR) di Kecamatan Langkaplancar, di mana ia mulai mengenal dasar-dasar ilmu pengetahuan. Pada usia 12 tahun, Kyai Abdul Hamid melanjutkan pendidikannya di salah satu pesantren yang terletak di Cianjur. Selama hampir 10 tahun di sana, Kyai Abdul Hamid mendalami berbagai disiplin ilmu agama, memperkuat fondasi spiritual dan intelektualnya, serta diperkenalkan dengan pendidikan pesantren yang memegang teguh paham Islam tradisional dari golongan *ahlussunah wal-jama'ah*. Setelah menyelesaikan pendidikan di Cianjur, pada tahun 1930, dia melanjutkan studi di Pesantren Sumelap, Tasikmalaya. Di pesantren ini, dia kembali memperdalam pemahaman dan pengetahuannya tentang agama Islam.

Dengan latar belakang pendidikan seperti di atas, Kyai Abdul Hamid kembali ke kampung halamannya untuk mengamalkan ilmu yang telah diperolehnya dengan mendirikan Pondok Pesantren pada tahun 1931. Pendiriannya didorong oleh kepedulian Kyai Abdul Hamid terhadap kondisi masyarakat pada saat itu, dimana masih ada kelompok-kelompok tertentu yang masih sering melakukan praktek-praktek *Jahiliyah* dan menganggapnya sebagai salah satu bagian dari ritual keagamaan, seperti menyembah terhadap pohon-pohon besar, menyembah batu besar dan dan sebagainya. Selain aspek pendidikan, Pondok Pesantren Al-Hamidiyah juga memiliki kontribusi penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kyai Abdul Hamid memanfaatkan pesantren ini untuk melatih, mempersiapkan, dan memobilisasi pasukan dari berbagai wilayah di Jawa Barat, termasuk Langkaplancar, Tasikmalaya, dan Ciamis. Para santri dan masyarakat setempat, yang tergabung dalam Hizbullah dan Sabilillah, dilatih di pesantren ini dengan semangat yang kuat untuk melawan penjajahan Belanda. Melalui pesantren ini, semangat perjuangan tidak hanya ditanamkan melalui pendidikan, tetapi juga melalui pengorganisasian strategis yang efektif, yang memungkinkan pasukan bergerak ke medan perang, termasuk dalam pertempuran Bandung Lautan Api, pertempuran di Manonjaya, Cikatomas, hingga Citalahab Langkaplancar.

Secara umum pesantren-pesantren juga menjadi saksi lahirnya semangat kebangsaan dan cinta tanah air di tengah masyarakat yang mengalami tekanan besar dari penjajahan diakibatkan oleh ketidakadilan, sehingga masa kemerdekaan ini berdampak sangat

besar tidak terkecuali Al-Hamidiyah. Al-Hamidiyah berupaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan menjadi motor penggerak masyarakat sekitar untuk ikut serta dalam beberapa pertempuran melawan penjajah. Dari latar belakang inilah penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana sejarah pondok pesantren Al-Hamidiyah dan perjuangannya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dengan judul: **Perjuangan Pesantren Al-Hamidiyah Pangandaran Jawa Barat Pasca Kemerdekaan (1945-1949)**.

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana sejarah berdirinya Pesantren Al-Hamidiyah di Pangandaran Jawa Barat?
- 2) Bagaimana perjuangan Pesantren Al-Hamidiyah dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia pasca kemerdekaan tahun 1945-1949?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Secara lingkup temporal penulisan ini mencakup dari tahun 1945 sebagai awal penulisan ini karena pada tahun tersebut, merupakan tahun menyerahnya Jepang kepada sekutu, yang membuka jalan bagi kolonialisme Belanda untuk mencoba merebut kembali Indonesia. Berakhirnya penulisan ini, yakni tahun 1949 dimana Belanda secara penuh mengakui kemerdekaan Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini diantaranya:

- 1) Untuk mengetahui sejarah berdirinya Pesantren Al-Hamidiyah di Pangandaran Jawa Barat.
- 2) Untuk mengetahui perjuangan Pesantren Al-Hamidiyah dalam mempertahankan kemerdekaan pasca kemerdekaan tahun 1946-1949.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian lain yang terkait. Selain itu, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang Sejarah Peradaban Islam.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, mengetahui sejarah berdirinya pondok Pesantren Al-Hamidiyah Pangandaran Jawa Barat serta perjuangannya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga guna menambah wawasan tentang pondok Pesantren.
- b. Bagi para pengamat sosial, dapat dimanfaatkan untuk memperluas wawasan dalam upaya mencermati perjalanan suatu lembaga pesantren serta perjuangannya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
- c. Untuk menambah sumber kepustakaan sejarah, yang membahas mengenai pondok pesantren.

F. Kajian Pustaka

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan wawancara langsung dan literatur lainnya. Adapun Kajian Pustaka yang akan menjadi referensi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul 'Peran Pesantren Tambakberas sebagai Pusat Laskar Hizbullah di Jombang Tahun 1944-1948', yang disusun oleh Muhammad Subhan dari Jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019, membahas tentang salah satu pesantren tertua di Kabupaten Jombang yang tetap eksis hingga kini. Penelitian ini mengkaji peran Pesantren Tambakberas dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia serta kontribusi Laskar Hizbullah Jombang dalam pertempuran 10 November di Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah, yang meliputi Heuristik, Deskriptif, Kritik Sumber, dan Interpretasi. Pendekatan yang diambil mengarah pada sosiologi, dengan menggunakan teori sosial dan teori Challenge and Response dari Arnold J. Toynbee. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pesantren Tambakberas, yang menjadi pusat pergerakan santri dan ulama di Jombang, memberikan pendidikan baik dalam aspek spiritual maupun fisik. Kyai Wahab Hasbullah mengutus Kyai Fattah Hasyim untuk melatih pasukan santri secara rohani. Pada 22 Oktober 1945, Laskar Hizbullah Jombang yang dipimpin oleh Kyai

Hasyim Latief dan Kyai Wahib Wahab, berangkat ke Surabaya untuk bertempur.⁶

Kedua penelitian memiliki kesamaan dalam objek yang diteliti, yaitu pondok pesantren. Namun, terdapat perbedaan yang jelas dalam ruang lingkup pembahasan. Penelitian yang disusun oleh Muhammad mencakup periode waktu yang lebih luas, yaitu sebelum dan setelah kemerdekaan. Di sisi lain, penelitian yang akan dibahas di sini lebih terfokus, hanya mengkaji perjuangan pondok pesantren yang terjadi setelah kemerdekaan. Dengan demikian, meskipun objek penelitiannya sama, masing-masing penelitian memiliki jangkauan waktu dan konteks yang berbeda.

2. Jurnal yang berjudul 'Perjuangan Rakyat Musi Ulu Rawas pada Masa Revolusi Fisik Tahun 1945-1949', yang ditulis oleh Nisa Maulia Ardianti, Sarkowi, dan Ira Miyarni Sutiyaningsih, diterbitkan dalam Jurnal Vol. 8 No. 1 pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perjuangan rakyat Musi Ulu Rawas selama masa Revolusi Fisik antara tahun 1945-1949. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian sejarah, dimulai dengan tahap heuristik untuk mengumpulkan sumber-sumber yang relevan. Tahapan selanjutnya meliputi verifikasi data, interpretasi, dan historiografi. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan sosial keagamaan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa

⁶ Muhammad Subhan, "Peran Pesantren Tambakberas Sebagai Pusat Laskar Hizbullah di Jombang Tahun 1944-1948" (Skripsi: Surabaya, Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019)

Selama Revolusi Fisik 1945-1949, rakyat Musi Ulu Rawas berjuang dengan berbagai cara, termasuk penculikan tentara Jepang, pencurian senjata, dan serangan rahasia atau terbuka. Mereka juga menggunakan taktik bumi hangus untuk menghalangi kemajuan pasukan Belanda di Lubuklinggau, menyebabkan konflik dan gencatan senjata yang tidak terhindarkan. Ketidaksetaraan jumlah dan persediaan senjata menyebabkan banyak korban di pihak Indonesia. Akhirnya, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar (KMB).⁷

Persamaan dari kedua penelitian ini terletak pada periode yang dibahas, yaitu antara tahun 1945 hingga 1949. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan dalam fokus penelitian masing-masing. Penelitian yang dilakukan oleh Nisa dan rekan-rekannya lebih menyoroti perjuangan masyarakat secara umum dalam mempertahankan kemerdekaan. Sementara itu, penelitian yang akan dibahas di sini memiliki fokus yang lebih khusus, yaitu perjuangan pondok pesantren dalam mempertahankan kemerdekaan. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian mencakup waktu yang sama, pendekatan dan objek yang diteliti berbeda.

3. Jurnal yang berjudul 'Peran Pesantren Syamsul Ulum Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia di Sukabumi (1945-1946)', yang ditulis oleh Nisa Fadlila Rahma, Mahbub Hefdzil

⁷ Nisa Maulia Ardianti, Sarkowi, Ira Miyarni Sutiyaningsih. Perjuangan Rakyat Musi Ulu Rawas Pada Masa Revolusi Fisik Tahun 1945-1949. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 8 No. 1, 2023

Akbar, dan diterbitkan dalam Jurnal Vol. 2 No. 1 pada tahun 2023, membahas tentang peran yang dimainkan oleh para santri di Pondok Pesantren Syamsul Ulum dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia di Sukabumi. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Pondok Pesantren Syamsul Ulum, di bawah kepemimpinan KH. Ahmad Sanusi, memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. KH. Ahmad Sanusi mendirikan kelompok belajar di pesantren yang melibatkan para santri. Saat terjadi pertempuran melawan sekutu di Sukabumi, kelompok-kelompok ini tidak hanya terlibat dalam pendidikan, tetapi juga aktif dalam pertempuran bersama Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Kontribusi pesantren dan santri dalam perjuangan kemerdekaan menunjukkan peran signifikan mereka dalam sejarah Indonesia.⁸

Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam objek yang diteliti, yaitu perjuangan pondok pesantren. Namun, perbedaan mencolok muncul dari lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Nisa Fadlila Rahma dan Mahbub Hefdzil Akbar berfokus pada pondok pesantren yang berada di Sukabumi. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan di sini mengambil lokasi di desa Pangkalan, Pangandaran, Jawa

⁸ Nisa Fadlila Rahma, Mahbub Hefdzil Akbar. Peran Pesantren Syamsul Ulum dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia di Sukabumi (1945-1946), *Priangan: Journal of Islamic Sundanese Culture*, Vol. 2 No. 1, 2023

Barat. Dengan demikian, meskipun keduanya membahas tema yang sama, mereka berfokus pada konteks geografis yang berbeda.

G. Landasan Teori

1. Pesantren

Secara etimologis, istilah "pesantren" berasal dari kata dasar "santri" yang diberi imbuhan awalan "pe" dan akhiran "án", yang berarti "tempat tinggal santri." Ini menunjukkan bahwa pesantren merupakan tempat tinggal sekaligus tempat belajar bagi para santri. Selain itu, ada pandangan lain mengenai asal usul kata "pesantren" yang menganggapnya sebagai gabungan dari kata "sant," yang berarti "manusia baik," dan suku kata "ira," yang mengandung arti "suka menolong".⁹ Secara terminologis, pesantren bisa dipahami sebagai lembaga pendidikan tradisional dalam Islam yang berfokus pada proses pembelajaran dan pemahaman ajaran agama. Di pesantren, para santri tidak hanya belajar tentang teori, tetapi juga mendalami dan menghayati ajaran Islam untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰ Lembaga ini sangat menekankan pada pentingnya moralitas keagamaan, yang berfungsi sebagai pedoman dalam tingkah laku dan interaksi sosial.

⁹ Anik Fadilah. Pesantren, Sejarah dan Metode Pembelajarannya di Indonesia. *Al Mabsut Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol.13, 2019, hlm. 78

¹⁰ Muhammad Ainul Fiqih. Peran Pesantren dalam Menjaga Tradisi-Budaya dan Moral Bangsa. *Pandawa*, Vol. 4 No. 2022, hlm. 45

Pesantren berfungsi untuk mendalami ajaran Islam dan menekankan moralitas keagamaan (ahlakul karimah) sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Wali Songo, terutama Syekh Maulana Malik Ibrahim (Sunan Gresik), merupakan tokoh awal yang mengembangkan pesantren di Jawa, diikuti oleh Sunan Ampel dan lainnya yang mendirikan berbagai pesantren di Nusantara.¹¹ Hal ini membuat Pesantren memiliki peranan yang signifikan dalam menyebarkan agama Islam serta dalam usaha meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan di masyarakat.

Pertumbuhan dan penyebaran pesantren di Indonesia, terutama di daerah pedesaan, merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari proses penyiaran agama Islam.¹² Ada dua alasan utama yang menjadikan pesantren unik. Pertama, pesantren muncul sebagai respons terhadap situasi dan kondisi masyarakat yang menghadapi perubahan sosial, termasuk krisis moral yang melanda. Kedua, tujuan pendirian pesantren adalah untuk menyebarkan ajaran Islam yang bersifat universal ke berbagai penjuru nusantara, yang dikenal memiliki sifat keberagaman, baik dalam aspek kepercayaan, budaya, maupun kondisi sosial masyarakat.¹³

¹¹ Moh. Subhan, Moh. Shoheh. Geneologi Pesantren Dan Kemerdekaan Republik Indonesia. *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke Islamian*, Vol.7 No. 2, 2020, hlm. 127-128

¹² M. Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Kontemporer*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2022)

¹³ Evi Fatimatur Rusdiyah, "Kontruksi Sosial Pendidikan Pesantren; Analisis Pemikiran Azyumardi Azra". *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* Vol. 5 No. 1, 2017, hlm. 33.

2. Peran dan Kepemimpinan

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan bentuk dinamis dari suatu kedudukan (status). Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi yang dimilikinya, maka ia sedang menjalankan peran tersebut. Perbedaan antara kedudukan dan peran dibuat demi kepentingan ilmiah, meskipun dalam praktiknya keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.¹⁴ Dalam hal ini, Kiai Abdul Hamid telah melaksanakan perannya dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia karena telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.

Sedangkan teori kepemimpinan karismatik menjelaskan bahwa seseorang dapat menjadi pemimpin karena memiliki daya tarik atau pengaruh luar biasa (karisma). Pemimpin dengan tipe ini kerap dipandang memiliki kekuatan supranatural. Konsep kepemimpinan semacam ini pertama kali dikemukakan oleh sosiolog asal Jerman, Max Weber. Ia merumuskan kepemimpinan karismatik sebagai berikut:¹⁵

“Berdasarkan persembahan pemimpin terhadap para pengikut dengan kesucian, kepahlawanan, karakter khusus seorang individu, dan juga pola normatif atau keteraturan yang telah disampaikan. Pemimpin kharismatik muncul pada waktu krisis atau keadaan yang

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2009), edisi baru, hlm. 213

¹⁵Anthony Giddens, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern: Suatu analisa karya tulis Marx, Durkheim dan Max Weber*; terj. Soeheba Kramadinata, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 215

sukar, termasuk jika ada masalah-masalah ekonomi, agama, ras, politik, sosial.”

Teori ini penulis gunakan untuk mengetahui bagaimana Kiai Abdul Hamid menjalankan fungsinya sebagai seorang kiai, pejuang, tokoh politik, dan juga sebagai panutan serta sebagai seorang pemimpin di kelompoknya. Menurut Weber ada tiga kepemimpinan yang dimiliki oleh pemimpin agama yaitu:

1. Kepemimpinan kharismatik, bahwa kepatuhan diberikan kepada pemimpin yang diakui karena sifat-sifat keteladanan pribadi yang dimilikinya.
2. Kepemimpinan tradisional, bahwa tugas mereka adalah mempertahankan aturan-aturan yang telah berlaku dalam agama.
3. Kepemimpinan rasional-legal bahwa kekuasaannya bersumber pada dan dibatasi oleh hukum.¹⁶

Fenomena kharismatik merupakan faktor yang memengaruhi posisi seorang kiai. Kharisma kiai bukanlah sesuatu yang bersifat metafisik, melainkan merupakan kualitas manusiawi yang dapat diamati secara empiris, karena berkaitan langsung dengan tindakan dan perilaku manusia.⁴ Ciri-ciri kepribadian yang dapat digunakan untuk mengenali seorang kiai yang kharismatik antara lain memiliki pengaruh yang kuat, bersifat ekspresif, tegas, ulet, berani, percaya diri, mudah

¹⁶J. Riberu, *Dasar-Dasar Kepemimpinan*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm. 5

bergaul, penuh energi, serta memiliki pandangan yang tajam dalam ide, sikap, dan tindakannya.

3. Teori Poskolonial

Secara umum, istilah poskolonial merujuk pada masa setelah berakhirnya era kolonialisme. Konsep ini sering digunakan sebagai teori atau pendekatan analisis untuk memahami berbagai persoalan yang muncul setelah banyak negara bekas jajahan meraih kemerdekaan. Kata "poskolonial" berasal dari istilah "colonial", yang berakar dari kata Latin *colonia*, yang berarti "lahan pertanian" atau "permukiman". Awalnya, istilah ini digunakan untuk merujuk pada warga Romawi yang tinggal di wilayah lain namun tetap berstatus sebagai warga negara Romawi.

Oxford English Dictionary memaparkan pengertian colonial sebagai berikut:

“Sebuah pemukiman dalam sebuah negeri baru ..., sekumpulan orang yang bermukim dalam sebuah lokasi baru dengan membentuk sebuah komunitas yang tunduk atau terhubung dengan negara asal mereka; komunitas yang dibentuk seperti itu, terdiri dari pemukiman asli dan para keturunan mereka dan pengganti-pengantinya, selama hubungan dengan negara asal tetap dipertahankan”.¹⁷

Ania Loomba menyatakan bahwa interaksi antara pendatang dan penduduk asli dalam perkembangannya menciptakan hubungan yang rumit dan menyisakan trauma dalam sejarah umat manusia. Masalah-masalah yang muncul

¹⁷ Ania Loomba & Hadikusomo, *Kolonialisme/Pascakolonialisme* (Yogyakarta : Benteng Budaya, 2003), hlm. 2

akibat kolonialisme dipahami sebagai bagian dari proses “pembentukan suatu komunitas” di wilayah jajahan.

Pengalaman kolonial ini kemudian terdokumentasikan dalam berbagai bentuk tulisan, seperti catatan pribadi, dokumen perdagangan, arsip pemerintahan masa lampau, karya sastra, dan tulisan ilmiah.¹⁸ Praktik kolonial yang terdapat pada berbagai dokumen itu, kemudian menjadi sumber bagi para ilmuwan yang berminat pada studi kolonial dan poskolonial.

Studi poskolonial awalnya muncul sebagai cara memahami ekspresi masyarakat yang dipengaruhi kolonialisme, lewat karya sastra, seni, dan bentuk budaya lainnya. Wacana ini mencerminkan kesadaran akan penindasan identitas oleh penjajah dan menjadi bentuk perlawanan serta upaya membangun kembali jati diri kultural yang terpinggirkan. Fokus utamanya adalah menganalisis strategi penjajah dalam membentuk citra kaum terjajah, serta bagaimana kaum terjajah merespons dan merebut kembali identitas mereka.¹⁹

Frantz Fanon, tokoh penting dalam studi poskolonial, menjelaskan bahwa kolonialisme menanamkan rasa inferioritas rasial dan kultural pada kaum terjajah melalui proses internalisasi. Hal ini memengaruhi kesadaran dan identitas mereka, bahkan setelah kolonialisme berakhir.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 2

¹⁹ I. Eddy Putranto, “Dekonstruksi Identitas (Neo)Kolonial : Sebuah Agenda Teologi Poskolonial”, *Melintas*, Vol. 27 No. 03, 2011, hlm. 314

Menurut Fanon, kolonialisme tidak hanya menguasai secara fisik, tetapi juga mengendalikan kesadaran dengan membentuk identitas kaum terjajah melalui manipulasi sejarah dan budaya sesuai kepentingan penjajah.²⁰

Nyoman Kutha Ratna, seorang pakar dalam kajian sastra poskolonial, merumuskan lima inti pemahaman mengenai poskolonialisme. Pertama, poskolonialisme berfokus pada analisis terhadap era kolonial. Kedua, ia memiliki hubungan yang erat dengan semangat nasionalisme. Ketiga, poskolonialisme berupaya mengangkat narasi-narasi kecil, membangun kekuatan dari akar rumput, serta mengambil pelajaran dari masa lalu untuk menapaki masa depan. Keempat, pendekatan ini menumbuhkan kesadaran bahwa penjajahan tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga menyentuh aspek psikologis. Dan kelima, poskolonialisme bukan sekadar teori, melainkan juga sebuah kesadaran akan pentingnya perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, rasisme, serta berbagai bentuk dominasi lainnya.²¹

Konsep ini mendapatkan perhatian dari Ahmad Baso yang menyatakan bahwa studi poskolonial tidak melihat apa yang terjadi dalam sejarah kolonialisme, akan tetapi melihat apa yang terjadi sesudah kekuasaan kolonial hengkang dari bumi pertiwi, dan apa pula yang terjadi

²⁰ Ahmad Baso, dkk. *Islam Pascakolonial: perselingkuhan agama, kolonialisme, dan liberalisme*, 2005. hlm. 51

²¹ I Nyoman Kutha Ratna, *Poskoloniaisme Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008)

kemudian dalam era kolonialisme. Poskolonial tidak mengutak-atik periodisasi sejarah. Poskolonial tidak terikat oleh periodisasi sejarah, karena masa lampau dapat dihadirkan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan.²¹

Studi poskolonial diterapkan dalam pembagian wilayah, kronologi, narasi, dan agenda politik. Studi ini menolak asumsi dan representasi yang dipakai oleh kekuatan kolonial untuk menguasai negara jajahan. Dalam bidang sejarah, studi poskolonial berfokus pada analisis yang lebih konstruktif terhadap fakta. Pendekatan poskolonial lebih menitikberatkan pada analisis kondisi mental dan kesadaran masyarakat yang terbentuk akibat penjajahan. Dengan demikian, sejarah tidak hanya sekadar menyajikan data, peristiwa, dan fakta, tetapi juga menggunakan fakta tersebut sebagai alat untuk menelaah dampak kolonialisme terhadap negara jajahan, khususnya dalam hal kondisi mental masyarakat terjajah.²²

Dalam penelitian mengenai resolusi jihad di kalangan santri dan kiai pesantren, peneliti menyoroti upaya serta strategi yang dilakukan, khususnya oleh kelompok Nahdliyyin, dalam menghadapi kolonialisme Sekutu. Resolusi jihad dipahami sebagai bentuk perlawanan poskolonial karena melibatkan pembentukan kesadaran kolektif masyarakat dalam menentang kekuatan kolonial. Perlawanan ini tidak hanya bersifat fisik, melainkan juga

²² ibid, hlm. 101-102

mencerminkan perjuangan dalam mempertahankan dan membangun identitas kebangsaan setelah kemerdekaan.

Sungiratharajah menyatakan bahwa poskolonialisme tidak hanya berarti pengusiran kekuasaan imperial secara fisik atau sekadar mengenang kejahatan imperium sambil menonjolkan keunggulan masyarakat atau budaya lokal. Lebih dari itu, poskolonialisme merupakan bentuk konfrontasi aktif terhadap sistem pemikiran yang dominan serta terhadap ketimpangan dan ketidakadilan yang ditimbulkannya. Poskolonialisme adalah upaya kritis yang bertujuan mengungkap keterkaitan antara ideologi dan kekuasaan. Ia menjadi bentuk perlawanan wacana terhadap imperialisme, termasuk ideologi, sikap, dan perilaku imperialis, serta berbagai warisannya dalam ranah politik, ekonomi, sejarah, dan budaya.²³

Melihat resolusi jihad NU melalui perspektif kajian poskolonial berarti mengamati bagaimana bangsa pribumi merespons dan melawan dominasi kekuasaan kolonial. Kehadiran bangsa kolonial di Indonesia, hingga masa kemerdekaan, justru membangkitkan semangat nasionalisme rakyat Indonesia. Nasionalisme ini menjadi pendorong kuat untuk mengusir kekuatan kolonial dari tanah air.

NU menunjukkan posisinya sebagai organisasi yang menentang kolonialisme dan berbagai upaya penjajahan kembali setelah kemerdekaan Indonesia, melalui penerbitan

²³ Robertus Wijanarko "Poskolonialisme dan Studi Teologi : Sebuah Pengantar" Jurnal Studia Philosophica, Vol. 8 No. 2 2008, hlm. 129

fatwa resolusi jihad. Fatwa ini menjadi simbol sekaligus teks perjuangan yang memberikan legitimasi terhadap perlawanan rakyat, khususnya dalam menghadapi penjajahan Inggris.

Partha Chatterjee²⁴ perjuangan kelompok nasionalis dan Islamis sebagai bentuk nasionalisme anti-kolonial, yang membedakan dua ranah: material dan spiritual. Ranah material seperti ekonomi dan teknologi dianggap bagian dari dominasi Barat yang perlu dipelajari. Sementara ranah spiritual yakni budaya dan identitas dianggap milik masyarakat Timur yang harus dijaga dari pengaruh kolonial. Dengan menguasai dunia material tanpa kehilangan jati diri spiritual, nasionalisme anti-kolonial memperkuat identitas pascakolonial.

Chatterjee menegaskan bahwa ranah spiritual dalam masyarakat pascakolonial berkembang dinamis karena kemampuan mereka membangun imajinasi jati diri yang khas dan berbeda dari dunia material Barat. Melalui nilai dan warisan budaya yang telah lama dimiliki, masyarakat merumuskan identitas otentik. Inilah yang kemudian membentuk struktur modernitas yang dibalut semangat spiritualitas Timur. Strategi ini mendorong lahirnya nasionalisme pascakolonial dengan muatan spiritual kuat sebagai ciri budaya yang tidak dimiliki oleh Barat.²⁵

²⁴ Partha Chatterjee, *Whose Imagined Community*, *Millenium* Vol. 20 No.3, 1991.

²⁵ Sulfikar Amin, *Epistemologi Nasionalisme Dalam*
<http://www.syarikat.org/tracback/03/11/2004>

Arah spiritualitas Timur tercermin dalam lahirnya konsep Pancasila pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Soekarno menegaskan bahwa Pancasila bukan ciptaannya sendiri atau tiruan dari Barat, melainkan digali dari nilai-nilai luhur yang telah lama hidup di masyarakat Indonesia. Ia hanya menyusunnya kembali untuk dipersembahkan kepada rakyat. Prinsip-prinsip dalam Pancasila juga berakar pada ajaran Islam, khususnya Alquran dan Hadis, yang menekankan persatuan dan menolak perpecahan di antara sesama manusia. Dalam ajaran Islam sendiri, nasionalisme atau kecintaan terhadap tanah air dipandang sebagai bagian dari keimanan, sebagaimana tertuang dalam doktrin *hubbul wathan minal iman* (cinta tanah air adalah bagian dari iman).²⁶ Sebagai kepercayaan, Islam menentang semangat memusuhi bangsa lain, dan sikap yang demikian ini merupakan ciri nasionalisme.²⁷

Para tokoh Islamis dan nasionalis meyakini bahwa nasionalisme Indonesia tidak hanya menjadi dasar perjuangan kemerdekaan, tetapi juga menginspirasi lahirnya berbagai ideologi dan nilai dalam kehidupan bernegara. Nasionalisme dipahami sebagai wujud cinta tanah air yang mencerminkan nilai luhur seperti patriotisme, kebersamaan, kebebasan, dan kemanusiaan. Ia tumbuh dari kesadaran sejarah, cinta bangsa, dan harapan politik bersama, sehingga

²⁶ Lazuardi Adi Sage, *Sebuah Catatan Sudut Pandang Siswono Tentang Nasionalisme dan Islam*, (Jakarta: Citra Media, 1996) hlm.77

²⁷ Hazem Zaki Nusaibeh, *Gagasan – Gagasan Nasionalisme Arab*, (Jakarta: Bhratara, 1969), hlm.17

menjadi unsur penting dalam menyatukan semangat serta loyalitas kolektif demi mewujudkan tujuan negara.²⁸

Resolusi jihad yang dikeluarkan oleh NU merupakan langkah strategis untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air Indonesia, sekaligus membangkitkan semangat rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman musuh dan penjajahan. Terlebih lagi, pada saat itu Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, namun langsung dihadapkan dengan ancaman kembalinya penjajahan melalui kedatangan tentara Sekutu, khususnya Inggris. Tanggapan NU melalui resolusi jihad dapat dipandang sebagai wujud perjuangan mempertahankan identitas nasionalisme bangsa Indonesia dalam menghadapi kekuatan penjajah.

4. Konsep Nasionalisme

Nasionalisme adalah paham yang menempatkan negara kebangsaan sebagai fokus utama kesetiaan individu. Ikatan kuat terhadap tanah air, tradisi lokal, dan otoritas daerah sudah ada sepanjang sejarah, meski intensitasnya berbeda-beda. Namun, baru pada akhir abad ke-18 M nasionalisme modern mulai diakui secara luas sebagai kesadaran kolektif.²⁹

Setelah abad ke-18, makna konsep *nation* berubah

²⁸ Dwi purwoko,(eds), *Negara Islam(?)*,(Jakarta: PT. Permata Artitika Kreasi, 2001),hlm.36

²⁹ Hans Kon, *Nasionalisme Arti dan Terjemahannya*, Terj. Sumantri Mertodipuro (Jakarta: Erlangga, 1984), hlm. 11

menjadi lebih positif dan mulai dipakai luas, terutama di Prancis. Saat itu, Parlemen Revolusi Prancis menyebut diri mereka *assemblée nationale*, menandai perubahan besar dalam struktur politik. Institusi ini bergeser dari yang eksklusif hanya untuk bangsawan menjadi egaliter, di mana semua kelas masyarakat memiliki hak politik setara dengan elit. Jika pada Abad Pertengahan kebebasan individu dan berpikir banyak dibatasi oleh dominasi gereja, maka setelah Renaisans muncul semangat pembebasan yang menolak segala bentuk penindasan, termasuk doktrin agama yang membatasi kebebasan berpikir.³⁰

Kata “bangsa” berasal dari bahasa latin “*nascl*” artinya dilahirkan.³¹ Apakah “bangsa” itu? Para ahli tidak pernah berhasil menyepakati definisi “bangsa”. Menurut Emerson, bangsa dapat dipahami secara sederhana sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari sekelompok orang yang merasa sebagai bagian dari “bangsa” tersebut. Diskusi mengenai “bangsa” lebih fokus pada bagaimana proses pembentukan sebuah bangsa terjadi dan mengapa banyak individu memilih untuk bergabung dan mengidentifikasi diri sebagai bagian dari suatu bangsa.³²

Benedict Anderson menyampaikan bahwa salah satu

³⁰ A. Daliman, Harmonisasi Hubungan Nasionalisme dan Agama Menuju Indonesia Baru, dalam *Kearifan Sang Profesor : Bersuku Bangsa untuk Saling Mengenal* (Yogyakarta : UNY Press, 2006), hlm. 57

³¹ Harold R. Isaacs, *Pemujaan terhadap Kelompok Etnis : Identitas Kelompok dan Perubahan Politik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm. 228

³² *Ibid.*, hlm. 234

sebab kuatnya ikatan kebangsaan adalah karena adanya dasar budaya yang hampir bersifat religius, yang menjadi penopang komunitas tersebut. Kebangsaan memberikan rasa kesinambungan di tengah ketidakpastian dan perubahan. Bangsa selalu membayangkan secara samar sebuah masa lalu yang berkesan dan juga membayangkan masa depan yang tak terbatas. Kebangkitan nasionalisme sebagai kekuatan budaya yang besar sejak awal abad ke-20 dipicu oleh melemahnya dua bentuk komunitas imajiner lainnya, yaitu komunitas agama dan kerajaan.³³

Anthony D. Smith melihat nasionalisme dari lima sudut pandang utama: pertama, sebagai proses pembentukan bangsa; kedua, sebagai kesadaran atau perasaan memiliki identitas bangsa; ketiga, sebagai unsur yang menekankan peran bahasa dan simbol bangsa; keempat, sebagai gerakan sosial-politik untuk kepentingan bangsa; dan kelima, sebagai doktrin atau ideologi bangsa secara umum maupun khusus. Namun, Smith juga menegaskan bahwa kesadaran kebangsaan tidak selalu membuat seseorang aktif dalam gerakan nasionalis.³⁴

Benedict Anderson berpendapat bahwa kesulitan memahami nasionalisme muncul karena kita sering menulisnya dengan huruf kapital “N,” sehingga nasionalisme

³³ Faruk HT, “Reimajinasi dan Deimajinasi : Soal Negara-Bangsa dan Kita” dalam TH. Sumartana (ed), *Nasionalisme Etnisitas : Perubahan Wacana Kebangsaan* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001) hlm. 67-69

³⁴ Anthony D Smith, *Nasionalisme Teori Idiologi Sejarah*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 7

dianggap setara dengan ideologi besar seperti Marxisme atau Liberalisme. Ia menyarankan agar nasionalisme ditulis dengan huruf kecil “n” agar pemahaman terhadapnya lebih sederhana dan nasionalisme bisa dipandang sejajar dengan konsep seperti agama atau kekerabatan, bukan sebagai “isme” politik lainnya.³⁵

Menurut Smith, nasionalisme adalah sebuah gerakan ideologis yang bertujuan untuk meraih dan menjaga otonomi, kesatuan, serta identitas suatu kelompok yang anggotanya memiliki tekad kuat untuk membentuk sebuah bangsa. Ia juga mengamati bahwa di negara-negara pascakolonial di Afrika dan Asia, termasuk Indonesia, nasionalisme tidak hanya terbatas pada tujuan politik semata, tetapi juga melibatkan aspek identitas nasional, khususnya yang berkaitan dengan budaya.

Ia juga menambahkan bahwa setiap bentuk nasionalisme berupaya mencapai sasaran identitas nasional dengan tingkat yang berbeda-beda, namun pada akhirnya semua akan kembali kepada cita-cita ideal bangsa tersebut.³⁶ Dalam konteks Indonesia, pembahasan lebih mendalam akan membawa pembaca memahami apa sebenarnya cita-cita ideal dari bangsa ini, sekaligus menjelaskan karakter nasionalisme yang dimiliki. Selain itu, hal ini juga menyoroti bagaimana kesadaran kebangsaan ditanamkan melalui peran penting

³⁵ Benedict Anderson, *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism*. In *The new social theory reader 2020*. hlm.8

³⁶ Anthony D Smith, *Op.cit*, hlm. 11-12

surat kabar yang tidak hanya berfungsi sebagai penentang kekuasaan, tetapi juga sebagai wadah untuk membangun gagasan tentang bangsa.

Soekarno memandang nasionalisme sebagai suatu paham yang berlandaskan kemanusiaan, di mana setiap aliran diberi kebebasan berkembang sesuai keyakinannya. Ia menegaskan bahwa nasionalisme tidak menghalangi persatuan dan perjuangan bersama ideologi seperti Marxisme dan Islamisme, karena ketiganya memiliki latar belakang sejarah politik yang sama, yakni melawan penjajahan dan penindasan kolonial. Soekarno juga membedakan nasionalisme menjadi dua jenis: nasionalisme Eropa dan nasionalisme Timur. Nasionalisme Eropa, yang berkembang di benua Eropa, bersifat agresif dan berorientasi pada keuntungan perdagangan sehingga dianggap salah dan akan punah. Sebaliknya, nasionalisme Timur yang bersifat ketimuran dianggap sebagai nasionalisme yang layak diikuti oleh bangsa-bangsa Asia, termasuk Indonesia.³⁷

Kemunculan nasionalisme yang berakar pada individualisme dan kepentingan pribadi melahirkan paradigma baru nasionalisme Barat yang chauvinistik dan kurang berperikemanusiaan. Selain itu, terjadi penyimpangan dalam pemahaman agama yang dijadikan legitimasi pelaksanaan kekuasaan demokratis. Soekarno mengilustrasikan hal ini lewat perspektif Islam, menegaskan

³⁷ Ir. Sukarno, *Dibawah Bendera Revolusi* cet ke-2, jil. I, (Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 1963), hlm 5-6

bahwa Islam sejati mengharuskan pemeluknya mencintai dan bekerja demi tanah air serta rakyat di sekitarnya.³⁸

Indonesia, seperti negara lain, memiliki bentuk nasionalisme yang khas sesuai dengan letak geografisnya di Asia Tenggara. Nasionalisme Indonesia tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses sejarah yang panjang. Nasionalisme mulai berkembang pesat saat masa Perang Pasifik, ketika ideologi fasis Jepang masuk ke wilayah ini. Selama pendudukan Jepang, semangat nasionalisme menjadi semakin kuat dan militan, dipengaruhi oleh pengalaman perang dan militerisme Jepang. Soekarno menegaskan hal ini dalam pidatonya di depan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 1 Juni 1945 dengan mengajukan lima asas yang dikenal sebagai Pancasila, sebagai dasar filosofi dan politik negara bangsa. Dalam pidatonya, Soekarno menghilangkan unsur ideologi Jepang dan lebih mengadopsi pemikiran Mahatma Gandhi yang menegaskan bahwa nasionalisme pada hakikatnya adalah kemanusiaan.³⁹

Mereka yang beragama Islam tetap teguh pada keyakinannya, demikian pula para nasionalis dan kaum Marxis yang berpegang pada ideologi masing-masing. Islam menghendaki nasionalisme yang tidak arogan, tidak menjatuhkan orang lain, dan tidak merusak kehidupan bersama. Nasionalisme Indonesia memiliki ciri khas yang dipengaruhi bukan hanya oleh posisinya sebagai bagian dari

³⁸ Ibid, hlm. 10

³⁹ Ibid., hlm 113

dunia Timur, tetapi juga oleh adanya gerakan-gerakan militan yang tumbuh di Indonesia. Soekarno menyatakan bahwa nasionalisme ini lahir terutama dari “wahyu” atau inspirasi pergerakan-pergerakan di Asia secara umum.⁴⁰

Soekarno melihat nasionalisme Indonesia sebagai bagian dari nasionalisme Timur yang lahir sebagai reaksi terhadap kolonialisme Eropa. Nasionalisme ini berlandaskan anti-kolonialisme dan anti-imperialisme, serta dirumuskan dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti kepercayaan kepada Tuhan, kemanusiaan, internasionalisme, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial. Karena keberagaman politik di Indonesia, nasionalisme harus mampu menyatukan berbagai kelompok. Dalam tulisannya, Soekarno menyatakan bahwa nasionalisme bisa berdampingan dan saling melengkapi dengan Islamisme dan Marxisme, bersama-sama menjadi kekuatan besar untuk meraih kemerdekaan.⁴¹

Dalam bukunya *Nationalism and Revolution in Indonesia*, George McTurnan Kahin menjelaskan bahwa agama Muhammad tidak hanya menyatukan masyarakat, tetapi juga menjadi simbol identitas bersama yang menunjukkan kesamaan nasib kelompok dalam melawan penjajah dan penindasan agama lain. Perjuangan nasionalisme di Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai agama telah berlangsung sejak lama, terlihat dari Perang

⁴⁰ Ibid., hlm. 74

⁴¹ Badri Yatim, Soekarno, Islam dan nasionalisme: rekonstruksi pemikiran Islam-nasionalis.1985. hlm. 87-88.

Diponegoro dan Perang Aceh. Pada abad ke-20, semangat nasionalisme ini semakin berkembang dengan berdirinya organisasi seperti Sarekat Islam (SI), Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI), dan Masyumi yang berperan penting dalam perjuangan bangsa.

Berdirinya organisasi sosial dan keagamaan yang ikut andil dalam perjuangan nasionalisme tergambar dalam pendapat Fred R. von der Mehden yang menyatakan;

Islam merupakan sarana yang paling jelas baik untuk membangun rasa persatuan nasional maupun untuk membedakan masyarakat Indonesia dari kaum penjajah Belanda. Pulau-pulau yang mencakup Hindia Belanda tidak pernah ada sebagai sebuah kesatuan linguistik, kulutra dan historis. Daerah- daerah terakhir yang jatuh ke dalam kekuasaan Belanda tidak pernah tunduh sepenuhnya hingga awal abad ke-20. Oleh sebab itu, karena terdiri dari berbagai tradisi historis, linguistik, kultural, dan bentuk geografis yang berbeda, maka satu-satunya ikatan universal yang tersedia di luar kekuasaan kolonial adalah Islam.⁴²

Perjuangan bangsa melawan penjajah, baik Belanda atau Jepang memang didasarkan pada semangat kebangsaan. Menurut Nasir menegaskan bahwa tanpa Islam, nasionalisme Indonesia tidak akan terbentuk karena Islam menanamkan persatuan dan menghilangkan sikap isolasionis antar pulau di Indonesia.⁴³

⁴²Fred R. von der Mehden, *Islam and The Rise of Nationalism in Indonesia*, desertasi doktoral, University of California, 1957, hlm. 34, dalam, Effendi, Bachtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Paramadina, 1998.hlm. 63.

⁴³ Ibid, hlm. 73

Para pejuang kemerdekaan yang melawan kaum penjajah adalah para kiai yang jiwanya terpancung untuk memprakarsai dan memimpin perlawanan.⁴⁴ Gerakan yang dimobilisasi ulama-kiai dalam melawan penjajah biasanya membawa doktrin agama, yaitu jihad.

Semangat perlawanan terhadap penjajah makin kuat karena doktrin jihad dan mati syahid tertanam dalam kesadaran masyarakat, seperti terlihat dalam pemberontakan petani Banten dan Perang Aceh yang menggunakan agama sebagai motivasi melawan penjajah. Ulama dan kiai tidak hanya berperan dalam agama, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial. Fatwa dan wejangan mereka menjadi sumber motivasi dan energi untuk menggerakkan massa. Oleh karena itu, peran kiai dalam perlawanan terhadap penjajah sangat dominan dan signifikan, selalu berada di garda depan perjuangan bangsa.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, yakni yaitu pendekatan untuk menguji dan menganalisis sumber-sumber masa lalu secara kritis. Metode sejarah merupakan prosedur sistematis dalam ilmu pengetahuan untuk memperoleh data yang relevan dengan objek penelitian. Menurut Sjamsuddin, metode dan metodologi merupakan dua hal yang berbeda; metode sejarah adalah langkah-langkah untuk mengungkap peristiwa masa

⁴⁴ Manfred Ziemken, *Pesantren dalam Perubahan*, cet-ke I (Jakarta; P3M, 1986), hlm. 58

lalu, sedangkan metodologi sejarah membahas kerangka pemikiran dan pendekatan epistemologis dalam memahami sejarah.⁴⁵

Secara khusus, penelitian ini berfokus pada kajian sejarah lokal. Dalam konteks ini, penting untuk dipahami bahwa penulisan sejarah lokal memiliki keterkaitan erat dengan penggunaan sejarah lisan (*oral history*). Integrasi sejarah lisan dalam studi sejarah lokal merupakan upaya untuk menempatkan kesaksian lisan sebagai salah satu sumber utama dalam rekonstruksi fakta-fakta historis yang bersifat lokal. Sejarah lisan tidak hanya berperan sebagai pelengkap sumber tertulis, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pendalaman substansi penelitian sejarah. Pertama, sejarah lisan membuka peluang untuk menggali informasi langsung dari para pelaku sejarah. Kedua, pendekatan ini memungkinkan diungkapkannya pengalaman subjek-subjek sejarah yang luput dari pencatatan dalam dokumen resmi. Ketiga, sejarah lisan memperluas cakupan isu-isu sejarah, mengingat pendekatan ini tidak terbatas pada ketersediaan dokumen tertulis, sehingga memberikan ruang lebih besar bagi eksplorasi narasi-narasi yang bersifat marginal namun bermakna.⁴⁶

Dalam pemaparannya, Kuntowijoyo juga menyampaikan bahwa sejarah berbeda dengan ilmu pengetahuan alam karena berkaitan dengan manusia dan kemanusiaan, yang tidak bisa diukur secara pasti dengan angka atau waktu tertentu. Menulis

⁴⁵ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2020) hlm. 13-14

⁴⁶ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), hlm. 29-30

sejarah itu kompleks karena peristiwa masa lalu tidak bisa diprediksi secara tepat. Sejarawan harus bekerja dengan potongan-potongan sumber yang ada, mencoba merekonstruksi peristiwa yang hilang atau terpecah. Karena itu, tugas sejarawan bukan hanya mengumpulkan data, tapi juga melakukan interpretasi dan imajinasi untuk menghidupkan kembali kejadian masa lalu dalam tulisan sejarah.⁴⁷

Menurut Kuntowijoyo, terdapat lima tahapan penulisan metode historis yaitu:

1. Pemilihan Topik

Tahap pemilihan topik merupakan langkah awal dalam pembentukan topik penelitian. Dalam memilih topik penelitian, penting untuk mempertimbangkan dua aspek utama: kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Kedekatan emosional berarti memilih topik yang sesuai dengan minat dan kesenangan kita. Sementara itu, kedekatan intelektual merujuk pada penguasaan kita terhadap topik tersebut. Jika kita belum menguasainya sepenuhnya, maka kita harus mempelajari literatur yang relevan dengan topik yang dipilih.⁴⁸

2. Pengumpulan Sumber (Heuristik)

Tahapan selanjutnya adalah Heuristik, yang berasal dari kata Yunani *'heuriskein'* yang berarti menemukan. Istilah

⁴⁷ Aditia Muara Padiatra, *Ilmu Sejarah: Metode dan Praktik* (Gresik: JSI Press, 2020), hlm 2-3

⁴⁸ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, 2018), hlm 70-73

ini terkait dengan kata “*eureka*,” yang artinya “untuk menemukan”.⁴⁹ Dengan demikian, heuristik dapat dipahami sebagai tahap untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber yang relevan dengan penelitian guna memahami peristiwa sejarah yang terjadi di masa lalu.⁵⁰ Jenis sumber sejarah dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah bahan yang langsung berasal dari masa lalu, seperti dokumen, artefak, monumen, prasasti, dan lainnya.⁵¹ Di sisi lain, sumber sekunder adalah materi yang berasal dari masa kini tetapi membawa informasi tentang masa lampau, seperti buku, artikel, film, dan sebagainya.⁵²

Pada tahapan ini penulis menggunakan sumber sejarah primer ialah sumber lisan (teknik wawancara), melalui penerapan teknik wawancara, peneliti memperoleh data dan informasi yang relevan guna mendukung penyusunan skripsi. Pemilihan narasumber didasarkan pada keterkaitan pengalaman mereka dengan peristiwa masa lampau yang menjadi fokus kajian penelitian. Narasumber dipilih dengan pertimbangan bahwa mereka benar-benar mengalami dan

⁴⁹ Ravico, Et. Al. Implementasi Heuristik dalam Penelitian Sejarah Bagi Mahasiswa. *Chronologia*, Vol. 4 No. 2023, hlm. 121

⁵⁰ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah Islam*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011) hlm. 101

⁵¹ Prof. Dr. Nina Herlina, M. S. *Metode Sejarah* (Bandung: Satya Historika, 2020), hlm. 33-34

⁵² Wulan Juliani Sukmana, *Metode Penelitian Sejarah, Seri Publikasi Pembelajaran*, Vol. 1 No. ,2021, hlm. 3

mengetahui terjadinya permasalahan pada masa lampau sesuai dengan kajian peneliti.

Teknik wawancara memiliki keterkaitan yang erat dengan pendekatan sejarah lisan (oral history). Sebagaimana dinyatakan oleh Widja, sejarah lisan dalam penulisan narasi historis pada dasarnya bertumpu pada sumber-sumber lisan atau informasi yang diperoleh melalui tuturan langsung. Sejarah lisan merupakan bentuk kesaksian yang diberikan oleh individu yang terlibat langsung sebagai pelaku sejarah, atau saksi yang memiliki pengetahuan langsung (firsthand knowledge) terhadap peristiwa yang diceritakannya.⁵³ Kuntowijoyo mengemukakan sebagai berikut.

Sejarah lisan sebagai metode dapat dipergunakan secara tunggal dan dapat pula sebagai bahan dokumenter. Sebagai metode tunggal sejarah lisan tidak kurang pentingnya jika dilakukan dengan cermat. Banyak sekali permasalahan sejarah bahkan zaman modern ini yang tidak tertangkap dalam dokumen-dokumen. Dokumen hanya menjadi saksi dari kejadian-kejadian penting menurut kepentingan pembuat dokumen dan zamannya, tetapi tidak melestarikan kejadian-kejadian individual dan yang unik yang dialami oleh seseorang atau segolongan...selain sebagai metode, sejarah lisan juga dipergunakan sebagai sumber sejarah.⁵⁴

Sehingga dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara, kepada:

- 1) Keluarga pendiri pondok Pesantren Al-Hamidiyah.

⁵³ Widja, I Gde. *Sejarah Lokal Suatu Perspektif dalam Pengajaran Sejarah*. (Bandung: Angkasa, 1991). Hlm. 3

⁵⁴ Kuntowijoyo, 2003. Loc.Cit., hlm. 28-30

2) Pimpinan (Penanggung Jawab) pondok Pesantren Al-Hamidiyah.

3) Tokoh/Sesepuh Masyarakat Desa Pangkalan.

Sedangkan untuk sumber sekunder, penulis menggunakan buku, skripsi, artikel/jurnal atau *website* yang relevan dengan topik penelitian yang dapat mengungkapkan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

3. Verifikasi (Kritik Data)

Setelah mengumpulkan sumber, langkah selanjutnya adalah melakukan kritik terhadap sumber untuk menilai otentisitas dan kredibilitasnya. Kritik merupakan kemampuan menilai sumber-sumber sejarah yang telah dicari (ditemukan).⁵⁵ Kritik ini terdiri dari dua jenis: kritik internal dan kritik eksternal. Kritik internal mengevaluasi kualitas sumber berdasarkan kompetensi, kedekatan sumber dengan peristiwa, serta objektivitas dan konsistensinya. Kritik eksternal menilai keabsahan sumber dengan memeriksa tanggal penerbitan, bahan dokumen, keaslian sumber (asli atau salinan), dan faktor lain seperti usia dan jenis tulisan.⁵⁶

Peneliti melakukan kritik sumber dengan memilih dan menyaring informasi dari sumber yang telah dikumpulkan, karena tidak semua data yang ada relevan atau sesuai dengan kebutuhan penelitian skripsi. Proses kritik sumber ini sangat penting dalam penelitian sejarah agar hasilnya menjadi karya

⁵⁵ Anwar Sanusi M.Ag, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Cirebon: Syekh Nurjati Press, 2013), hlm. 137

⁵⁶ Heryati, "Pengantar Ilmu Sejarah", Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017. hlm. 66

ilmiah yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama karena peristiwa yang diteliti terjadi di masa lalu.

4. Interpretasi

Tahap keempat dalam metode sejarah adalah interpretasi, yang menuntut kecermatan dan sikap objektif dari sejarawan, terutama dalam menghadapi interpretasi subjektif terhadap fakta sejarah.⁵⁷ Pada tahap ini, penting untuk memahami karakteristik peradaban atau kondisi umum yang sebenarnya, serta menggunakan pemikiran kritis untuk mencapai kesimpulan atau gambaran sejarah yang bersifat ilmiah. Pada tahap interpretasi ini, ilmu sejarah tidak berdiri sendiri; sebaliknya, diperlukan konsep-konsep dan pendekatan teoritis dari berbagai ilmu lain serta analisis yang mendalam.

Pada tahap ini, peneliti memilah dan menafsirkan setiap fakta yang dianggap relevan dengan topik penelitian. Fakta-fakta yang diperoleh dari narasumber utama dibandingkan dan dikaitkan dengan informasi lain dari sumber tertulis maupun lisan. Langkah ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan kesalahan atau penyimpangan data. Jika fakta-fakta tersebut saling mendukung, maka disusun menjadi rangkaian informasi yang merekonstruksi peran Pesantren Al-Hamidiyah dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945–1949.

Interpretasi dilakukan untuk memahami hubungan antar fakta dan memberikan makna yang menyeluruh. Proses

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 69

ini bertujuan menyusun fakta-fakta sejarah menjadi satu kesatuan yang utuh, sehingga dapat membantu menjawab permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

5. Penulisan (Historiografi)

Historiografi adalah Langkah terakhir dalam melakukan metode penelitian Sejarah, yang mencakup cara menulis, menyajikan atau melaporkan hasil penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan dari sumber- sumber sejarah. Pada tahap ini penulis menggunakan kemampuan kritis dan imajinatif untuk menghasilkan tulisan yang menarik dan objektif.⁵⁸

Historiografi merupakan penulisan sejarah yang dimulai dengan penelitian (analitis) terhadap peristiwa-peristiwa masa lalu. Penelitian dan penulisan sejarah ini terkait dengan berbagai latar belakang, seperti latar belakang teoritis, wawasan, metodologi, gaya penulisan sejarah, latar belakang sejarawan atau penulis sumber sejarah, serta aliran penulisan sejarah yang digunakan, dan lainnya.⁵⁹

I. Sistematika Penulisan

Penulisan ini akan di susun atas pembagian bab dan sub bab sebagai berikut:

⁵⁸ Eva Syarifah Wardah, Metode Penelitian Sejarah. *Tsaqofah*, Vol. 12, 2014, hlm. 174

⁵⁹Anwar Nurpiddin, Samsudin, dan Sulasman. Historiografi H. Rosihan Anwar Dalam Penulisan Sejarah di Indonesia Tahun 1945-2011, *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, Vol. 19 No. 1 ,2022, hlm. 72

BAB I ini menghimpun beberapa hal mengenai pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian atau pendekatan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II ini akan membahas mengenai Kondisi Jawa Barat Pasca Kemerdekaan, yang berisi dua sub bab, yaitu: Kondisi Politik dan Militer Jawa Barat Pasca Kemerdekaan, dan Pesantren di Jawa Barat Pasca Kemerdekaan.

BAB III ini akan menjelaskan tentang bagaimana Sejarah berdirinya pondok Pesantren Al-Hamidiyah Pangandaran Jawa Barat, pada bab ini terbagi menjadi tiga sub bab, yaitu: Letak Geografis Pesantren Al-Hamidiyah Pangandaran Jawa Barat, Tokoh Pendiri Pesantren Al-Hamidiyah Pangandaran Jawa Barat, Latar Belakang Pendirian dan Perkembangan Awal Pesantren Al-Hamidiyah Pangandaran Jawa Barat.

Bab IV membahas peran Pesantren Al-Hamidiyah Pangandaran Jawa Barat Pasca Kemerdekaan (1945-1949). Terdiri dari 2 sub bab, yaitu: Terjadinya Agresi Militer di Wilayah Jawa Barat Bagian Tengah dan Selatan, dan Perjuangan Pesantren Al-Hamidiyah Pangandaran Dalam Mempertahankan Kemerdekaan.

BAB V berisi tentang kesimpulan dan saran, dimana bab ini merupakan bab terakhir pada penelitian ini yang berisi kesimpulan dari semua bab yang telah di paparkan dan juga saran untuk para peneliti yang akan meneliti dengan tema yang sama seperti penulis.